

Laporan Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode Oktober 2019

1. Periode Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode Penyampaian Informasi dan Masalah dalam laporan ini yaitu meliputi permintaan informasi dan penyampaian masalah yang masuk dalam rentang bulan Oktober 2019.

2. Jumlah Permintaan Informasi dan Penyampaian Masalah/Aduan

Jumlah Permintaan Informasi dan Masalah yang masuk dalam rentang bulan Oktober 2019 yaitu sebanyak 31 item yang berasal dari Sigi, Palu, dan Donggala. Sebanyak 6 item berasal dari Sigi, 16 Item dari Palu, dan 9 item dari Donggala. Adapun Daftar Permintaan Informasi dan Masalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Daftar Permintaan Informasi dan Masalah

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan
1	KOTA PALU	28/10/2019	Kenapa data mereka tidak masuk dalam penerima dana stimulan sedangkan mereka sudah pernah di data?
2	DONGGALA	28/10/2019	Jarak sekolah yang terlalu jauh
3	KOTA PALU	27/10/2019	Informasi Jadup (Jatah Hidup) akan diberikan selama 2 tahun
4	KOTA PALU	27/10/2019	Kenapa santunan duka kami belum diberikan sedangkan yang lain sudah diberikan?
5	KOTA PALU	27/10/2019	Apakah bisa membangun di lahan sebelumnya yang masuk zona merah?
6	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah status tanah di zona merah yang ditinggalkan masih menjadi milik warga?
7	KOTA PALU	23/10/2019	Di manakah patok zona merah untuk Kelurahan Petobo?
8	KOTA PALU	23/10/2019	Kriteria apa saja yang masuk ke dalam pendataan Huntap?
9	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah sudah ada SK untuk Huntap Petobo?
10	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah Huntap yang diberikan statusnya akan menjadi hak milik?
11	KOTA PALU	23/10/2019	Meminta kepada BPN untuk mengecek terdapat beberapa sertifikat di atas lokasi calon Huntap Petobo
12	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah pendataan Huntap PUPR sama dengan pendataan Huntap Budha Tzu chi?
13	SIGI	21/10/2019	WTB berdomisili dan beralamat KTP di Kabupaten Morowali, dan lokasi rumah rusak berat di Desa Loru dan ingin mendapatkan huntap
14	SIGI	21/10/2019	Warga ingin dibangun hunian tetap di lokasi warga sendiri

15	SIGI	21/10/2019	Warga yang berada di zona 1 berkeinginan mendapatkan huntap
16	KOTA PALU	19/10/2019	Kami menghimbau agar Lurah Balaroa lebih transparan dalam pendataan WTB dan dapat melibatkan setiap RT yang ada di Kelurahan Balaroa Apakah Huntap Duyu hanya diperuntukan untuk 450 unit atau ada penambahan?
17	KOTA PALU	18/10/2019	Jika dalam satu rumah terdapat 5 KK apakah bisa mendapatkan 5 huntap? Apakah orang yang sewa tanah dan kontrak juga bisa mendapatkan huntap?
18	KOTA PALU	18/10/2019	Belum tersosialisasinya tentang huntap secara menyeluruh
19	KOTA HUNTAP	18/10/2019	Apakah dalam satu sertifikat di dalamnya terdapat 4 rumah dan 4 KK bisa mendapatkan 4 huntap?
20	DONGGALA	18/10/2019	Tidak ada lokasi fasilitas kesehatan di lokasi huntap
21	DONGGALA	16/10/2019	Harga tanah yang belum jelas
22	SIGI	16/10/2019	WTB tidak bersedia direlokasi jika administrasi kependudukannya dipindahkan
23	DONGGALA	15/10/2019	Penjelasan waktu pembangunan huntap
24	DONGGALA	12/10/2019	Sarana air bersih tidak mencukupi kebutuhan masyarakat
25	SIGI	11/10/2019	Sebaiknya penentuan persil ditentukan oleh fasilitator dan pemerintah desa
26	KOTA PALU	10/10/2019	Data nama untuk keluarga Bapak Rois tidak terdaftar di data BPBD Kota Palu untuk pilihan huntap
27	DONGGALA	6/10/2019	Di Kelurahan Boya terdapat data yang tidak sinkron yang dikeluarkan oleh Pemda dengan data yang ada di Kelurahan
28	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Tanjung Batu terdapat 3 WTB yang tidak bersedia dipindahkan ke huntap
29	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Tanjung Batu terdapat 1 orang yang tidak memenuhi kriteria penerimaan huntap
30	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Labuan Bajo tidak adanya surat pernyataan bersedia direlokasi untuk 6 orang WTB
31	SIGI	5/10/2019	Pemilik rumah memiliki 7 anak, tetapi rumah belum diwariskan. Jadi tujuh bersaudara tersebut meminta bantuan huntap diganti dengan uang agar bisa dibagi rata

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

3. Media Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah

Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah sebagian besar dilakukan melalui tatap muka langsung dalam melakukan survei dalam rangka penyusunan LARAP, dan sebagian besar laporan berasal dari masyarakat dan aparat setempat.

4. Penyelesaian Permintaan Informasi dan Masalah

a. Permintaan Informasi dan Masalah terselesaikan

Dari 31 PIM yang telah dikompilasikan terdapat PIM yang sudah diselesaikan atau dapat diselesaikan langsung oleh fasilitator di lapangan. PIM yang dapat diselesaikan di

lapangan yaitu 31 PIM atau sebesar 100%. Sebagian besar permintaan informasi dan masalah terkait dengan hunian tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Permintaan Informasi dan Masalah Terselesaikan

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan	Tema Aduan	Unit Organisasi/Unor/OPD	Unit Terkait	Lokasi Kejadian	Tanggal	Uraian Hasil Akhir
1	KOTA PALU	28/10/2019	Kenapa data mereka tidak masuk dalam penerima dana stimulan sedangkan mereka sudah pernah didata?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Tanamodindi	28/10/2019	Dijelaskan bahwa untuk saat ini dihimbau untuk warga yang rusak berat, sedang, dan ringan untuk memasukkan data kembali dikarenakan data yang tidak akurat
2	KOTA PALU	27/10/2019	Informasi Jadup (Jatah Hidup) akan diberikan selama 2 tahun	Pengelolaan dampak Sosial	Dinas Sosial	Safeguard	Bayaoe	27/10/2019	Kepala Bidang Kebencanaan dan Logistik menjelaskan bahwa jika untuk masalah Jadup hanya diberikan selama 2 bulan
3	KOTA PALU	27/10/2019	Apakah bisa membangun di lahan sebelumnya yang masuk zona merah?	Pengelolaan dampak lingkungan	BPB	Safeguard	Balaroa	27/10/2019	Kepala Bidang Kebencanaan dan Logistik menjelaskan bahwa jika membangun di zona merah maka dilarang oleh pemerintah. Dan jika ada lahan lain yang tidak berada di zona merah bisa membangun dengan bantuan stimulan
4	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah status tanah di zona merah yang ditinggalkan masih menjadi milik warga?	Pengelolaan dampak Sosial	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa untuk sementara tanah warga yang berada di zona merah masih menjadi milik warga karena belum terdapat peraturan pemerintah tentang status lahan tersebut
5	KOTA PALU	23/10/2019	Di manakah patok zona merah untuk Kelurahan Petobo?	Pengelolaan dampak lingkungan	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa untuk sementara peta zona merah masih dalam proses pembuatan
6	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah sudah terdapat SK untuk Huntau Petobo?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Ke-PUPR-an	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa untuk SK Huntau Petobo saat ini masih dalam proses pembuatan
7	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah huntau yang diberikan statusnya akan menjadi hak milik?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, &	Dinas Ke-PUPR-an	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa untuk status kepemilikan huntau nantinya akan

				drainase permukiman)					menjadi milik WTB
8	KOTA PALU	23/10/2019	Meminta kepada BPN untuk mengecek terdapat beberapa sertifikat di atas lokasi calon Huntap Petobo	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Pertanahan/ATR BPN	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Staf BPN Sigi akan mengecek sertifikat yang berada di lokasi calon Huntap Petobo yang dibantu oleh warga Petobo
9	KOTA PALU	23/10/2019	Apakah pendataan Huntap PUPR sama dengan pendataan Huntap Budha Tzu chi?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Ke-PUPR-an	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa untuk pendataan PUPR lebih mendalami untuk aspek sosial ekonomi bagi WTB yang akan pindah ke lokasi huntap
10	SIGI	21/10/2019	Warga yang berada di zona 1 berkeinginan mendapatkan huntap	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Kabobona	21/10/2019	Berdasarkan hasil konsultasi Pemda Sigi (BPBD) bahwa warga di zona 1 tidak berhak mendapatkan huntap karena penerima huntap hanya warga yang berada di zona merah
11	KOTA PALU	19/10/2019	Kami menghimbau agar Lurah Balaroa lebih transparan dalam pendataan WTB dan dapat melibatkan setiap RT yang terdapat di Kelurahan Balaroa	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Balaroa	18/10/2019	Tim SF sudah menyampaikan saran dari Pak RT
12	KOTA PALU	18/10/2019	Jika dalam satu rumah terdapat 5 KK apakah bisa mendapatkan 5 huntap? Apakah orang yang sewa tanah dan kontrak juga bisa mendapatkan huntap?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Donggala Kodi	18/10/2019	Askot menjelaskan bahwa jika Huntap Duyu untuk tahap awal berjumlah 450, dalam satu rumah ada 5 KK tidak bisa mendapatkan huntap 5 hanya 1 yang bisa, dan orang yang sewa/kontrak tidak berhak mendapatkan huntap karena harus menyertakan bukti kepemilikan tanah.
13	KOTA PALU	18/10/2019	Belum tersosialisasinya tentang huntap secara menyeluruh	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Dinas Ke-PUPR-an	Safeguard	Donggala Kodi	18/10/2019	SF menjelaskan bahwa huntap di bangunan untuk WTB yang rusak berat, hilang, dan berada di zona merah. Dan juga menjelaskan pendataan yang dilakukan oleh

14	KOTA PALU	18/10/2019	Apakah dalam satu sertifikat di dalamnya terdapat 4 rumah dan 4 KK bisa mendapatkan 4 huntap?	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Donggala Kodi	18/10/2019	PUPR bukan hanya memindahkan WTB, tetapi juga mendata sosial ekonomi WTB jika mereka sudah pindah Askot menjelaskan bahwa pernyataan BPBD Kota Palu dalam satu sertifikat di dalamnya terdapat 4 rumah dan 4 KK bisa mendapatkan 4 huntap.
15	DONGGALA	18/10/2019	Tidak ada lokasi fasilitas kesehatan di lokasi huntap	Hunian sementara (hunlara)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	10 Lompio	18/10/2019	Melakukan koordinasi terhadap kepala desa untuk lahan fasilitas kesehatan
16	DONGGALA	16/10/2019	Harga tanah yang belum jelas	Pengelolaan dampak Sosial	Dinas Sosial	Safeguard	10 Lompio	16/10/2019	Disarankan untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa
17	SIGI	16/10/2019	WTB tidak bersedia direlokasi jika administrasi kependudukannya dipindahkan	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	11 Kabobona	16/10/2019	Pemda akan mengganti administrasi wilayah domisili warga tersebut
18	DONGGALA	15/10/2019	Penjelasan waktu pembangunan huntap	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Penyediaan Perumahan	Safeguard	10 Lompio	16/10/2019	Memberikan informasi pembangunan huntap
19	SIGI	11/10/2019	Sebaiknya penentuan persil ditentukan oleh fasilitator dan pemerintah desa	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	3 Sibalaya Utara	11/10/2019	Setelah terdapat rembug antara masyarakat, pemerintah desa, dan tim fasilitator pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kantor Desa Sibalaya Utara dengan hasil adanya kesepakatan penentuan persil akan ditentukan oleh tim fasilitator dan aparat desa dengan bukti notulensi pertemuan
20	KOTA PALU	10/10/2019	Data nama untuk keluarga Bapak Rois tidak terdaftar di data BPBD Kota Palu untuk pilihan huntap	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Besusu Barat	10/10/2019	Askot menjelaskan bahwa, pada saat BPBD Kota Palu melakukan pendataan di Hunlara Besusu Barat atas nama Bapak Rois tidak ada, jadi disarankan untuk

21	SIGI	5/10/2019	Pemilik rumah memiliki 7 anak, tetapi rumah belum diwariskan. Jadi tujuh bersaudara tersebut meminta bantuan huntap diganti dengan uang agar bisa dibagi rata	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	11 Kabobona	7/10/2019	melakukan pendataan kembali dengan memberikan <i>form</i> permintaan huntau Pemerintah tidak bisa mengganti rumah dengan uang, Pemda hanya akan membuat rumah dilokasi yang aman dan meminta para keluarga untuk berembug sebagai ahli waris
22	KOTA PALU	23/10/2019	Kriteria apa saja yang masuk pendataan Huntau?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	BPB	Safeguard	Petobo	23/10/2019	Asisten Sosial Ekonomi menjelaskan bahwa kriteria yang masuk pendataan huntau adalah warga yang rusak berat, hilang, dan berada di zona merah
23	DONGGALA	28/10/2019	Jarak sekolah yang terlalu jauh	Pendidikan	Dinas Sosial	Safeguard	10 Lompio	28/10/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
24	KOTA PALU	27/10/2019	Kenapa santunan duka kami belum diberikan sedangkan yang lain sudah diberikan? WTB berdomisili dan beralamat KTP di Kabupaten Morowali, dan lokasi rumah rusak berat di Desa Loru dan ingin mendapatkan huntau	Pengelolaan dampak sosial	Dinas Sosial	Safeguard	Balaroa	27/10/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
25	SIGI	21/10/2019	Warga ingin dibangun hunian tetap di lokasi warga sendiri	Hunian	Penyediaan Perumahan	Safeguard	12 Loru	21/10/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
26	SIGI	21/10/2019	Sarana air bersih tidak mencukupi kebutuhan masyarakat	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	12 Loru	21/10/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
27	DONGGALA	12/10/2019	Di Kelurahan Boya terdapat data yang tidak sinkron yang dikeluarkan oleh Pemda dengan data	Air Bersih	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	10 Lompio	12/10/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah
28	DONGGALA	6/10/2019		Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	SIM	Boya	6/10/2019	Sudah dilakukan pelaporan ke Satker BPBD dan PUPR Kabupaten Donggala

			yang ada di Kelurahan	permukiman)					
29	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Tanjung Batu terdapat 3 WTB yang tidak bersedia dipindahkan ke huntap	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	SIM	Tanjung Batu	5/10/2019	Sudah dilakukan pelaporan ke Satker BPBD dan PUPR Kabupaten Donggala
30	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Tanjung Batu terdapat 1 orang yang tidak memenuhi kriteria penerimaan huntap	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	SIM	Tanjung Batu	5/10/2019	Sudah dilakukan pelaporan ke Satker BPBD dan PUPR Kabupaten Donggala
31	DONGGALA	5/10/2019	Di Kelurahan Labuan Bajo tidak terdapat surat pernyataan bersedia direlokasi untuk 6 orang WTB	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntap (rumah, jalan, & drainase permukiman)	SIM	Labuan Bajo	5/10/2019	Sudah dilakukan pelaporan ke Satker BPBD dan PUPR Kabupaten Donggala

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

Dari berbagai permintaan Informasi dan pengaduan masalah yang masuk terdapat beberapa yang dominan ditanyakan antara lain:

1. Status kepemilikan tanah warga yang berada di Zona Merah;
2. Status kepemilikan huntap yang diberikan pemerintah;
3. Informasi tentang huntap yang kurang jelas (terkait jumlah rumah, infrastruktur, dan lain sebagainya).